

## Pelatihan Mengelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari

Widya Sari<sup>1</sup>, Silpa Wardatussaniah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia  
widya.sari.sy@gmail.com

---

*Received : Nov' 2023 Revised : Nov' 2023 Accepted : Nov' 2023 Published : Nov' 2023*

---

### ABSTRACT

*The hope of the community is that BUMDes can help better and professionally manage village potential. However, Cijambu BUMDes experience problems, especially in terms of financial management and making financial statements. This activity uses the PAR (Participatory Action Research) method. Before the PKM activity was held, the author inventoried the problems in Cijambu Village and the things needed by the community. To overcome the problems of BUMDes in Cijambu Village, in the seminar, the author gave directions on how to record financial transactions and steps to make financial statements in accordance with BUMDes. By referring to Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities, which can also be applied by MSME actors in Cijambu village. The results of the activity showed that participants gained knowledge and information on how to manage finances effectively and efficiently, as well as understand the recording of financial transactions and making financial statements in accordance with BUMDes, so that BUMDes can meet reporting according to regulations.*

**Keywords:** Cijambu Village; Financial Management; Village-Owned Enterprises.

### ABSTRAK

Harapan masyarakat agar BUMDes dapat membantu pengelolaan potensi desa dengan lebih baik dan profesional. Namun BUMDes Cijambu mengalami permasalahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangannya. Kegiatan ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Sebelum diadakan kegiatan PKM, penulis menginventarisir permasalahan yang ada di Desa Cijambu dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan BUMDes di Desa Cijambu, di dalam kegiatan seminar, penulis memberikan arahan bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi keuangan dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan BUMDes. Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, yang juga sekaligus dapat diterapkan oleh pelaku UMKM di desa Cijambu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang cara mengelola keuangan yang efektif dan efisien, serta memahami pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan BUMDes, sehingga BUMDes dapat memenuhi pelaporan sesuai peraturan.

**Kata Kunci :** Badan Usaha Milik Desa; Desa Cijambu; Pengelolaan Keuangan.

---

### PENDAHULUAN

Desa Cijambu merupakan sebuah desa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Posisinya berada di ujung utara wilayah

---

kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang dan Kecamatan Rancakalong di ketinggian kaki gunung Cijambu, sebelah timur laut Gunung Manglayang.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa Desa Cijambu berstatus pedesaan dengan klasifikasi desa swadaya [1]. Desa Cijambu memiliki bentang hamparan permukaan tanah berupa perbukitan. Selain sebagai pemukiman, luas wilayah desa yang subur diperuntukkan sebagai lahan persawahan maupun lahan perkebunan. Lahan persawahan tersebut ditunjang dengan sumber air dari mata air pegunungan dan juga sungai Ciherang. Hasil pertanian di antaranya adalah padi dan berbagai jenis palawija. Sedangkan hasil perkebunannya berupa berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran.

Sektor lain yang juga dikembangkan di Desa Cijambu adalah sektor peternakan, serta sektor industri rumah tangga yang berkaitan dengan pengolahan makanan - minuman, pengolahan kayu dan pengolahan logam. Selain sektor - sektor tersebut, desa Cijambu juga mempunyai potensi di bidang wisata, berupa wisata alam air terjun dan wisata alam bumi perkemahan [2].

Potensi-potensi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil industri rumah tangga serta wisata alam yang ada di desa Cijambu, mayoritas masih dikelola perorangan dengan cara pemasaran yang masih sederhana. Masyarakat berharap pada lembaga badan usaha milik desa yang baru terbentuk, agar dapat membantu pengelolaan potensi desa dengan lebih baik dan profesional.

Badan usaha milik desa, sering pula disebut BUMDes, merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan suatu Peraturan Desa. Sedangkan kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan BUMDes dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain yaitu Pemerintah Desa terkait, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), pinjaman, dapat juga berupa penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDes dapat melakukan pinjaman, namun hanya setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa [3].

Pengelolaan BUMDes berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan selama pendirian. Pendirian BUMDes diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Jika pendirian BUMDes diprakarsai oleh pemerintah pusat, maka pengelolaan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Badan Usaha Milik Desa dikelola hingga taraf hidup masyarakat meningkat secara ekonomi. Selain itu, pengelolaan BUMDes juga harus mampu meningkatkan

---

---

kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaannya, BUMDes menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan BUMDes juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa. Fungsi pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis usaha dasar yang dikelola oleh BUMDes meliputi bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan industri rumah tangga. Usaha dasar ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan desa. Pengelolaan BUMDes juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurus urusan pedesaan [4].

Sebagai lembaga ekonomi yang berdasarkan potensi desa dan berbasis kearifan lokal, Badan Usaha Milik Desa belum efektif sebagai entitas bisnis. Selama ini yang menjadi tantangan bagi BUMDes antara lain kesulitan birokrasi dalam memperoleh status badan hukum bagi BUMDes yang baru didirikan, kurangnya semangat pemerintah desa untuk mengembangkan bisnis BUMDes, dan relatif terbatasnya sektor yang dapat dikapitalisasi di daerah pedesaan. BUMDes seringkali tidak menguntungkan, kekurangan modal atau sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. BUMDes juga seringkali memiliki struktur internal yang tidak stabil karena dikelola oleh penduduk desa dan perangkat desa yang cenderung kurang memiliki pendidikan akuntansi dan keuangan. Permasalahan tersebut mengakibatkan buruknya atau lemahnya implementasi BUMDes di beberapa daerah. Kepastian hukum juga menjadi masalah bagi banyak BUMDes, karena tidak adanya status hukum menjadi penghambat mereka untuk mencari investor atau membuka rekening bank.

BUMDes Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, mengalami permasalahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangannya. Masyarakat Desa Cijambu menginginkan perbaikan dari masalah-masalah tersebut. Secara umum pengurus BUMDes di Desa Cijambu belum optimal dalam pengelolaan dana BUMDes. Mereka belum memahami secara utuh dan seksama terkait aturan dalam mengelola dana BUMDes. Pencatatan dan pembukuan dana BUMDes juga masih dilakukan secara manual dan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Sebagaimana diketahui, PAR adalah penelitian yang melibatkan secara aktif semua *stakeholders* atau pihak-pihak yang relevan, dalam pengkajian aktivitas yang sedang berlangsung (di mana pengalaman para pihak ini sendiri sebagai permasalahannya) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik [5]. Sebelum diadakan kegiatan PKM, penulis

menginventarisir permasalahan yang ada di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023, dimulai pukul 10.00 WIB, dan bertempat di Aula Kantor Desa Cijambu. Dihadiri oleh masyarakat, termasuk Ketua BUMDes serta pelaku - pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cijambu pada kali ini, berbentuk seminar/pelatihan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi penyampaian materi, dimana penulis membagikan pengetahuan dan wawasan kepada para peserta mengenai cara mengelola keuangan yang efektif dan efisien di BUMDes, serta pencatatan transaksi keuangan BUMDes serta bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan BUMDes, dan langkah-langkah pembuatannya.

Materi pertama dalam seminar tersebut adalah pemaparan tentang cara mengelola keuangan di BUMDes, yang juga dapat diterapkan pada unit UMKM. Dimulai dengan penjelasan manfaat-manfaat pengelolaan keuangan dengan baik. Sampai tahap demi tahap cara memulai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Setelah selesai sesi tanya jawab terkait materi pertama, dilanjutkan materi kedua. Walaupun dengan format seminar, acara berlangsung interaktif antara penulis dan para peserta. Oleh karenanya, sambil menjelaskan konsep pencatatan transaksi keuangan BUMDes serta bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan BUMDes, penulis tetap sambil menggali dari peserta seminar, terutama pengurus BUMDes, mengenai kebutuhan mereka untuk sistem pembukuan yang baik dan memadai.



**Gambar 1. Penyampaian Materi**

Untuk mengatasi permasalahan BUMDes, penulis memberikan arahan bagaimana cara melakukan pencatatan pembukuan berdasarkan masing-masing

transaksi keuangan. Dilanjutkan dengan penjelasan langkah – langkah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan BUMDes. Laporan keuangan tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK – EMKM), yang juga sekaligus dapat diadopsi oleh pelaku UMKM di desa terkait.

Sesi kedua ini juga dilengkapi dengan pembagian *hard-copy* format laporan keuangan tersebut oleh penulis, agar dapat diterapkan langsung dengan mudah oleh pengurus BUMDes dan pelaku UMKM. Diharapkan setelah ini BUMDes dapat memenuhi pelaporan sesuai peraturan.



**Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan**

## **PENUTUP**

Kegiatan pengabdian kali ini berjalan dengan lancar. Kesimpulan yang diambil berdasarkan proses dan hasil kegiatan PKM ini adalah bahwa dalam mengatasi permasalahan BUMDes di Desa Cijambu, penulis memberikan arahan kepada pengurus BUMDes dan juga para pelaku UMKM, tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang efektif dan efisien serta cara pencatatan transaksi keuangan. Pengurus BUMDes dan para pelaku UMKM selain mendapatkan pengetahuan dan informasi baru terkait hal-hal tersebut, mereka juga terbantu dengan penjelasan langkah – langkah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan BUMDes, yang sekaligus juga dapat diterapkan pelaku UMKM.

Untuk pelaksanaan PKM selanjutnya di Desa Cijambu, diharapkan pengurus BUMDes juga dapat mempelajari penerapan pembukuan dan pengelolaan dana dengan menggunakan teknologi komputer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] <https://sumedangkab.bps.go.id/>
- [2] <https://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-cijambu.htm>
- [3] <https://bumdes.id/>

- [4] M. C. Anwar, "BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya?". <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=all>.
- [5] A. Afandi, dkk. 2016. "Modul Participatory Action Research". Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- [6] M. N. Yamin and H. Sakawati, "PKM penguatan ekonomi desa melalui BUMDes di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto", *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar*, 2019, ISBN: 978-623-7496-01-4.
- [7] R. M. Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1 - 4, ISSN 1410 - 5675.
- [8] U. Kulsum, dkk., "PKM: Pengelolaan Dana BUMDES", *SWARNA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, [ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna](http://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna), Vol. 1, No. 3 November 2022, e-ISSN: 2963-184Xpp. 335-340.